

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN *PROPERTY & REAL ESTATE*
YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**INTAN ZAHIRAH
NPM : 2002110039**



**PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023/2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya. Atas izin-nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Property & Real Estate* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2022”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Kedua orangtua saya yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang tidak terkira.

- 2) Bapak Drs. Tarmizi Ggadeng, S.E., M.Si., M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 3) Bapak H. Zulkifli Umar, S.E, M.Si, Ak, CA, dan Ibu Elviza, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 4) Ibu Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si, selaku Ketua Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 5) Ibu Irmawati, S.E.,M.Si.,Ak.CA dan Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si,MM selaku dosen pembimbing I & II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya masing-masing dan telah membimbing dengan sangat baik, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan cepat.
- 6) Seluruh dosen pengasuh mata kuliah pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 7) Saudara dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Banda Aceh, 15 Januari 2024

Penulis

Intan Zahirah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Masalah	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 <i>Good Corporate Governance</i>	9
2.1.2 Komite Audit.....	11
2.1.3 Komisaris Independen.....	12
2.1.4 Ukuran Perusahaan.....	14
2.1.5 <i>Tax Avoidance</i>	16
2.2 Penelitian Sebelumnya	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
2.3.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	24
2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	25
2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> ..	26
2.4 Hipotesis.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN	 29
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.1.1 Tujuan Penelitian	29
3.1.2 Jenis Penelitian.....	30
3.1.3 Horizon Waktu	30
3.1.4 Unit Analisis	30
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	31
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4 Definisi Operasional dan Variabel	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	35

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda	35
3.6 Pengujian Hipotesis.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif	39
4.1.2 Hasil Pengujian Hipotesis	41
4.1.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama	42
4.1.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua.....	42
4.1.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga.....	43
4.1.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis Keempat.....	44
4.1.3 Koefisien Determinasi.....	44
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan secara Simultan Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	45
4.2.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	46
4.2.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	48
4.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	49
BAB V KESIMPULAN DAAN SARAN	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rata-rata Rasio <i>Tax Avoidance</i>	3
Tabel 1.2 Rata-rata Rasio Komisaris Independent dan Ukuran Perusahaan	3
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	20
Tabel 3.1 Kriteria Populasi Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	34
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Hipotesis	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	27
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nama-nama Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> yang Menjadi Pengamatan Penelitian	56
Lampiran 2 Operasional Variabel <i>Tax Avoidance</i>	58
Lampiran 3 Operasional Variabel Komite Audit.....	60
Lampiran 4 Operasional Variabel Komisaris Independen	62
Lampiran 5 Operasional Variabel Ukuran Perusahaan	64
Lampiran 6 <i>Output</i> Pengolahan Data.....	66

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN *PROPERTY & REAL ESTATE*
YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2021-2022**

**INTAN ZAHIRAH
NPM. 2002110039**

Pembimbing I : Irmawati, S.E.,M.Si.,Ak.CA
Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si,MM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, baik secara simultan maupun parsial. GCG dalam penelitian ini diproksikan dengan komite audit dan komisaris independen. Ketiga variabel bebas tersebut akan diuji pengaruhnya terhadap satu variabel tidak bebas yaitu *tax avoidance*. Objek dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2022. Sampel yang telah memenuhi kriteria yaitu sebanyak 79 perusahaan menjadi pengamatan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : *Tax avoidance, good corporate governance*, komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan.

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN *PROPERTY & REAL ESTATE*
YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2021-2022**

**INTAN ZAHIRAH
NPM. 2002110039**

Pembimbing I : Irmawati, S.E.,M.Si.,Ak.CA
Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si,MM

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Good Corporate Governance (GCG) and company size on tax avoidance, both simultaneously and partially. GCG in this study is proxied by the audit committee and independent commissioners. The three independent variables will be tested for their influence on one independent variable, namely tax avoidance. The object and population used in this study are property & real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2021-2022. The sample that has met the criteria, namely 79 companies, is an observation. The analysis method used is multiple linear regression. The results of this study found that the audit committee, independent commissioners and company size simultaneously affect tax avoidance. The audit committee partially has a negative effect on tax avoidance, independent commissioners partially have a negative effect on tax avoidance and company size partially has a positive effect on tax avoidance.

Keywords : *Tax avoidance, good corporate governance, audit committee, independent commissioners and firm size.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri *Property & Real Estate* menjadi penopang utama dalam perekonomian Indonesia. Terdapat peluang besar industri properti yang perlu terus digarap, yakni pasokan perumahan yang terjangkau. Kebangkitan properti membuka peluang bagi masyarakat di berbagai sektor, menurunkan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, mendorong industri komponen dalam negeri dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam mengembangkan *Property & Real Estate*, perusahaan memerlukan investasi modal besar, sehingga banyak perusahaan *property* terlibat dalam pasar modal untuk menghimpun investasi yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai investasi.

Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pajak bersifat wajib bagi setiap warga negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil

mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi. Dalam kondisi seperti inilah akan timbul perlawanan pajak, maka dari itu terjadi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah sistem penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada. Metode penghindaran pajak biasanya difasilitasi dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang tidak jelas, sehingga berpotensi besar untuk penghindaran pajak (Hermawan et al., 2021).

Praktik penghindaran pajak dikatakan konsisten dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, karena diyakini memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang mempengaruhi penerimaan pemerintah dari departemen pajak. Di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, dan sisi lain penghindaran pajak tidak diperbolehkan. Adapun berbagai peraturan yang telah dibuat untuk mencegah penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut yaitu Perdirjen No. PER-43/PJ/2010 terkait *transfer pricing*, yaitu prinsip kewajaran dan praktik bisnis dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak (Mangoting, 2020).

Tabel 1.1
Rata-rata rasio *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2022

NO	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	<i>Tax Avoidance</i>	0.931066284	0.137010498

Sumber : Laporan Keuangan masing-masing perusahaan, (data diolah 2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa pengamatan awal terlihat rasio *tax avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* tahun 2021-2022 memiliki rata-rata rasionya mengalami peningkatan dan penurunan atau penurunan dan peningkatan (fluktuatif). Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yaitu perusahaan yang memiliki rasio dibawah 0,25. Sebagaimana halnya pada pasal 17 ayat (1) bagian b UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak adalah 25%. Demikian hal itu semakin tinggi rasio mengindikasikan penurunan *tax avoidance* perusahaan. Sebaliknya, apabila nilai rasio semakin rendah, maka mengindikasikan peningkatan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 1.2
Rata-rata rasio Komisaaris Independen dan Ukuran Perusahaan sektor *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2022

Uraian	Tahun	
	2021	2022
Komisaris Independen	0,50	0,40
Ukuran Perusahaan	27,17	27,12

Sumber : Laporan Keuangan masing-masing perusahaan, (data diolah 2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat rata-rata rasio komisaris independen dan ukuran perusahaan pada perusahaan *Property & Real Esatate* tahun 2021-2022. Kedua faktor memiliki rata-rata rasionya berfluktuatif dari tahun ke tahun.

Dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan konsep *good corporate governance*. GCG merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan perusahaan secara jangka panjang. Dalam mekanisme *Corporate Governance* telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak dalam hal ini pihak yang berhubungan dengan *good corporate governance* adalah komite audit dan komisaris independen, yang diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan perusahaan yang jujur dan transparan.

Keberadaan komite audit didalam perusahaan dapat berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan dapat juga memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Komisaris independen pada suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris

independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance*. Penelitian mengenai variabel komisaris independen yang dilakukan oleh Syafruddin dkk (2020) menunjukkan bahwa komisaris independent berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Dea dkk (2018) komisaris independent berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Namun demikian, berdasarkan tabel terlihat rata-rata rasio komisaris independen pada tahun 2022 mengalami penurunan dan meningkatkan *tax avoidance* pada tahun 2022. Hal ini terlihat komisaris independen pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 0,50 ke 0,40 pada tahun 2021. Penurunan komisaris independen menyebabkan adanya praktik *tax avoidance* pada tahun 2022. Kondisi ini yang menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan, dapat terlihat dari total penjualan, total aset dan kapitalisasi pasar (Lana, 2007). Perputaran yang lebih tinggi menunjukkan perputaran dana yang lebih tinggi bagi perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan aset yang meningkat menunjukkan modal yang diinvestasikan lebih besar. Perusahaan yang dinyatakan besar yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar dan memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun. Penelitian mengenai variabel ukuran perusahaan yang dilakukan oleh Sari (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel terlihat rata-rata rasio ukuran perusahaan pada tahun 2022 mengalami penurunan dan meningkatkan *tax avoidance* pada tahun 2022. Hal ini terlihat ukuran perusahaan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 27,17 ke 27,12 pada tahun 2021. Penurunan ukuran perusahaan pada tahun 2022 menyebabkan adanya praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Kondisi ini yang menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Property & Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2022**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Komite Audit, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2022
2. Apakah Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* tahun 2021-2022
3. Apakah Komisaris Independen secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* tahun 2021-2022

4. Apakah Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* tahun 2021-2022

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menguji pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2022
2. Untuk menguji pengaruh Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* tahun 2021-2022
3. Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* tahun 2021-2022
4. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* tahun 2021-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

a. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengenai *good corporate governance* dan ukuran perusahaan.

b. Manfaat Teoritis

Sebagai wahana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama terkait dengan *good corporate governance* dan ukuran perusahaan pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada variabel *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Property & Real Estate*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Good Corporate Governance*

Menurut Yadiati dalam (Karinda, 2018), *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur keberadaan fungsi (organ) dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, baik di dalam perusahaan maupun dengan pihak eksternal. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan yang ditetapkan untuk menentukan bagaimana pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan berinteraksi satu sama lain dalam manajemen dan pengawasan perusahaan dikenal sebagai *Good Corporate Governance*.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Trisnaningsih (2023), *Good Corporate Governance* terbagi menjadi lima prinsip, yaitu:

1. *Transparency* (Transparansi)

Keterbukaan dalam proses pengambilan suatu keputusan dan pengungkapan informasi yang penting serta relevan tentang perusahaan adalah penting. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan dan signifikan dengan cara yang memadai, transparan, dan akurat, sehingga informasi tersebut dapat dengan mudah diakses dan dimengerti oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan hak-hak mereka.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik, manajer menetapkan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban mereka. Akuntabilitas adalah dasar pengendalian sistem yang baik karena mengetahui bagaimana dewan komisaris, direksi, manajer eksekutif, dan pemegang saham membagi wewenang.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kepatuhan pada prinsip perusahaan dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan perusahaan diharapkan memberitahu perusahaan bahwa, dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan tersebut juga bertanggung jawab kepada shareholders dan stakeholder lainnya.

4. *Independency* (Kemandirian)

Kemandirian adalah situasi di mana manajemen perusahaan harus beroperasi dengan standar profesional tanpa adanya konflik kepentingan, serta tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak manapun sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Perusahaan perlu memastikan bahwa hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pemegang saham (*shareholder*) telah dipenuhi secara adil dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut merupakan pokok penting dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, GCG juga memiliki struktur sebagai implementasi nyata dari prinsip-prinsip yang ada. Struktur *governance* dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan, serta dikendalikan. Menurut Pratiwi (2014), struktur *good corporate governance* memiliki beberapa indikator yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu struktur yang mengatur pola hubungan antara peran dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan para *Stakeholder* lainnya.

2.1.2 Komite Audit

Menurut Tjager dalam Isnania (2018) komite audit merupakan komite yang dibentuk dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan prinsip-prinsip *corporate governance* terutama transparansi dan pengungkapan diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif. Komite audit terdiri dari 2 anggota independen dan 1 ketua yang berasal dari komisaris independen. Tugas utama komite audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan, evaluasi, dan supervisi terhadap pengelolaan perusahaan.

Menurut Surya dalam Oktofian (2015), pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

- a. Laporan keuangan (*financial reporting*) Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan.
- b. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

- c. Pengawasan perusahaan (*corporate control*) Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Berdasarkan tanggung jawab komite audit diatas, ketiganya berhubungan dengan ilmu akuntansi, sehingga komite audit yang kompeten paling tidak menguasai ilmu akuntansi serta keuangan. Komite audit perlu memahami peran mereka untuk memastikan bahwa organisasi telah mempunyai program anti-*fraud* dan pengendalian untuk membantu manajemen dalam pencegahan *fraud*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah sebuah kelompok independen yang dibentuk dalam suatu perusahaan untuk membantu dan mengawasi fungsi audit internal dan eksternal serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditentukan.

2.1.3 Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Seorang anggota komisaris independen diangkat melalui keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Anggota komisaris independen merupakan pihak luar yang telah diangkat secara resmi menjadi bagian dari perusahaan. Menurut (Amelia & Hernawati, 2016) Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan apapun dengan anggota

dewan komisaris lainnya, direksi ataupun pemegang saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak secara independen.

Sesuai dengan peraturan OJK No.57/POJK.04/2017 Pasal 19 (Santoso, 2017) mewajibkan perusahaan memiliki komisaris independen, di mana dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang persentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Komisaris independen mempunyai tanggung jawab pokok untuk mendukung penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam suatu perusahaan berdasarkan (Prastika dkk., 2015):

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi tersebut.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya,
5. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komisaris independen adalah suatu jabatan yang menjadi bagian dari keanggotaan dewan komisaris, namun bersifat independen dan tidak memiliki hubungan dengan anggota komisaris lain, pemegang

saham, direktur, atau manajemen perusahaan karena independen bertindak semata-mata hanya demi kepentingan perusahaan.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Menurut Hery (2017) ukuran Perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham. Ukuran perusahaan dapat menentukan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguk laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. (Kurniasih dkk, 2013)

Ukuran perusahaan dibagi dalam 3 jenis, perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Penentuan ukuran perusahaan berdasarkan pada total aset perusahaan. Semakin besar total neraca, semakin jelas perusahaan tersebut memiliki prospek jangka panjang yang baik (Widayanti dkk, 2022).

Dalam Febrianty (2011) ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 jenis sebagai berikut :

1. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun
2. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar.
3. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran perusahaan Sartono

(2010) dalam Ta'dir, dkk (2014), sebagai berikut :

1. Besarnya total aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan, baik dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap, menjadi penentu ukuran perusahaan. Apabila perusahaan memiliki aktiva dalam jumlah besar, maka mencerminkan bahwa perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai perusahaan besar. Sedangkan apabila jumlah aktiva yang dimiliki lebih kecil, maka mencerminkan perusahaan tersebut sebagai perusahaan kecil.
2. Besarnya hasil penjualan adalah suatu proses jual beli yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Besar kecilnya hasil penjualan menjadi indikator ukuran perusahaan, di mana perusahaan yang besar umumnya memiliki tingkat penjualan yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil.
3. Besarnya kapitalisasi pasar adalah total nilai surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dalam satu pasar. Jika harga saham suatu perusahaan di pasar tinggi, menunjukkan jumlah saham yang beredar banyak. Hal ini menyebabkan kapitalisasi pasar perusahaan tersebut bertambah besar dan diklasifikasikan sebagai perusahaan besar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengukur besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aktiva, karena semakin besar total aktiva maka perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang.

2.1.5 *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum untuk operasi wajib pajak agar mengurangi kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya untuk menghindari pajak yang dibuat secara sah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan karena perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan (Barli, 2018).

Menurut (Zeng, 2019) penghindaran pajak merupakan kegiatan yang berisiko karena membebankan biaya yang besar terhadap perusahaan, seperti pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Terdapat Tiga cara penghindaran pajak menurut Merks (2007) dalam (Rahedi, 2019) sebagai berikut :

1. Memindahkan subyek pajak atau obyek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. Ketentuan Anti *Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Dapat di simpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghidaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal yang tidak melanggar hukum perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang undang

perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dalam arti lain, perusahaan dengan sengaja melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil pembayaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara, dengan dilakukannya penghindaran pajak.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Syafruddin dkk (2020) Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Tahun Periode 2015-2018. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan data sekunder yang diperoleh dengan metode kuantitatif. Sampel dari penelitian ini sebanyak 142 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, proporsi dewan komisaris independen, komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara parsial sedangkan kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan komite audit dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya penelitian Dea dkk (2018) Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. Dan diperoleh sebanyak 61 sampel melalui metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen dan komite audit, dan variabel

likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*, sedangkan variabel profitabilitas dan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya Rahmi Dkk (2021) Pengaruh Komite Audit, Resiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, *Good Corporate Governance* Dan Beban Pajak Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property & real estate* yang tercatat di BEI periode 2016 hingga 2019. Objek penelitian ini sebanyak 65 perusahaan *property, real estate* dan konstruksi. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan regresi linier berganda dan hasilnya adalah komite audit, risiko perusahaan, ukuran perusahaan, *good corporate governance* dan beban pajak tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap penghindaran pajak.

Kemudian penelitian Masitoh dkk (2020) dengan judul Pengaruh Gcg, Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan selama 3 tahun yaitu tahun 2016-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 dengan penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga menghasilkan sampel sebanyak 21 perusahaan sektor perbankan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa dewan komisaris independen, profitabilitas, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya penelitian Kurnia dkk (2022) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. Dengan jumlah sampel berjumlah 15 perusahaan, dengan total 45 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah pengujian statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber bacaan yang dapat memberikan sumber informasi teoritis dan empiris mengenai permasalahan ini.

Selanjutnya penelitian Sari (2023) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Dengan Sampel pada penelitian ini terdiri dari perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019 yang berjumlah 21 perusahaan dengan jangka waktu 4 tahun sehingga menghasilkan data 84 data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dan penelitian. Hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Penelitian (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh tata Kelola Perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan manufaktur tahun periode 2015-2018, Syafruddin dkk (2020)	Metode kuantitatif dan analisis regresi berganda	Kompensasi eksekutif, proporsi dewan komisaris independen, komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara parsial sedangkan kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan kepemilikan institusional, proporsi dewan	- Metode penelitian kuantitatif - Teknik analisis data - Dependen: Penghindaran Pajak -Independen: Tata Kelola Perusahaan yang baik	- Lokasi penelitian - Tahun Penelitian - Jumlah Populasi dan sampel

Tabel 2.1
Tabel Lanjutan

No	Judul, Nama penelitian (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Avoidance</i> Pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016, Dea dkk (2018)	Metode kuantitatif dan analisis linier berganda	<i>good corporate governance</i> yang diproksikan dengan komisisaris independen dan komite audit, dan variabel likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> , sedangkan variabel profitabilitas dan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	- Metode penelitian kuantitatif - Teknik analisis data Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>good corporate governance</i> dan Ukuran Perusahaan	- Lokasi penelitian - Tahun penelitian - Jumlah populasi dan sampel - Variabel independen: Profitabilitas dan Likuiditas
3	Pengaruh Komite Audit, Resiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, <i>Good Corporate Governance</i> Dan Beban Pajak	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	komite audit, risiko perusahaan, ukuran perusahaan, <i>good corporate governance</i> dan beban pajak tidak berpengaruh secara parsial	- Metode penelitian kuantitatif - Tempat penelitian - Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen:	- Tahun penelitian - Jumlah populasi dan sampel -Variabel Independen Resiko Perusahaan dan Beban Pajak

Tabel 2.1
Tabel Lanjutan

No	Judul, Nama Penelitian (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan <i>property & real estate</i> yang tercatat di BEI periode 2016-2019, Rahmi dkk (2021)		maupun simultan terhadap penghindaran pajak.	<i>Good Corporate Governance</i> , Komite Audit dan Ukuran Perusahaan	
4	Pengaruh Gcg, Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018, Marsitoh dkk, (2020)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Dewan komisaris independen, profitabilitas, dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak	- Metode penelitian kuantitatif - Dependen : <i>Tax Avoidance</i> - Independen: <i>Good corporate governance</i> dan ukuran Perusahaan	- Tempat penelitian - Tahun penelitian - Jumlah populasi dan sampel - Variabel Independen : <i>Capital Intensity</i>

Tabel 2.1
Tabel Lanjutan

No	Judul, Nama Penelitian (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indoensia Periode 2018-2020, Kurnia, Dkk (2022)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linear berganda	secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara parsial memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independent berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	- Metode penelitian kuantitatif - Dependen : <i>Tax Avoidance</i> - Independen: <i>Good corporate governance</i>	- Tempat penelitian - Tahun penelitian - Jumlah populasi dan sampel

Tabel 2.1
Tabel Lanjutan

No	Judul, Nama Penelitian (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Sari (2023)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukan komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .	- Tempat penelitian - Metode penelitian kuantitatif - Dependen : <i>Tax Avoidance</i> - Independen: Komite audit, komisaris independent dan ukuran perusahaan	- Tahun penelitian - Jumlah populasi dan sampel

Sumber : Penelitian (Data di olah, 2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Komite Audit dengan *Tax Avoidance*

Komite audit memiliki hubungan terhadap *tax avoidance* dengan hal itu Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan karena komite audit akan memonitor segala aktivitas yang berlangsung di dalam perusahaan (Danny, 2021). Untuk mengendalikan manajer dalam meningkatkan pertumbuhan profit perusahaan merupakan tanggungjawab dari komite audit dimana nantinya manajer cenderung

akan melakukan penekanan-penekanan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak, hal ini yang akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Apabila dewan komisaris menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka akan menyebabkan komposisi yang ditentukan atau adanya penambahan anggota komite audit akan memperparah terjadinya *tax avoidance*, hal tersebut dikarenakan komite audit merupakan salah satu yang dapat memberikan secara langsung pengawasan. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syafruddin dkk (2020) dan Masitoh dkk (2020) bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Hubungan Komisaris Independen Perusahaan dengan *Tax Avoidance*

Komisaris independen memiliki hubungan terhadap *tax avoidance* dengan hal itu jumlah dewan komisaris independen yang banyak akan meningkatkan pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen untuk mengantisipasi adanya tindakan penghindaran pajak. Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka dalam memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan penghindaran pajak.

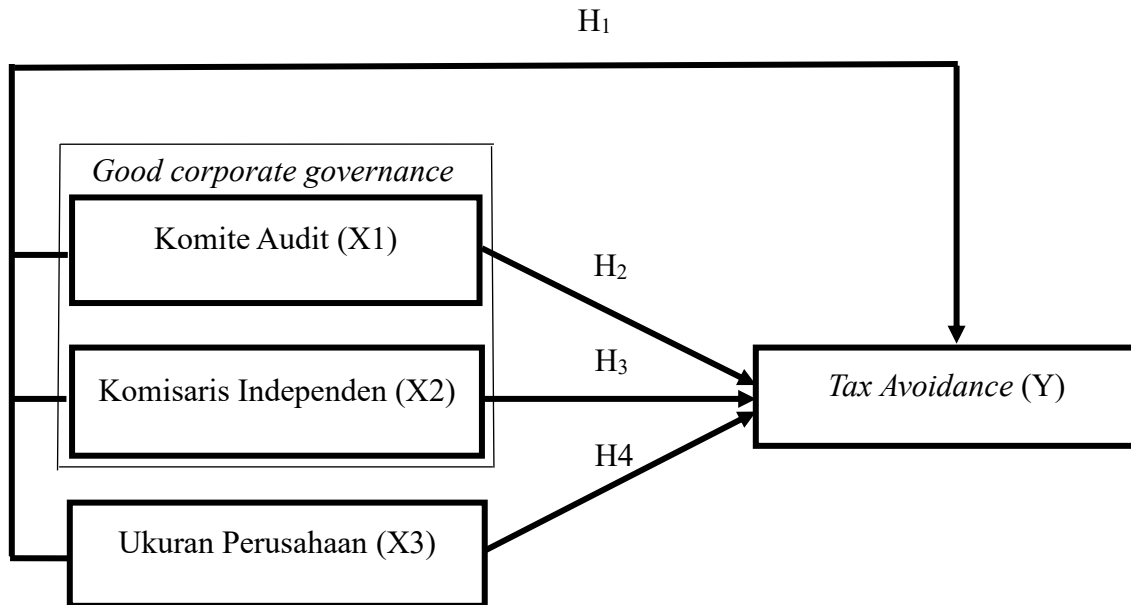
Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syafruddin, dkk (2020) dan Kurnia, dkk (2022) bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Hubungan Ukuran Perusahaan dengan *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan memiliki hubungan terhadap *tax avoidance* dengan hal itu ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Cahyono dkk, 2016). Perusahaan yang memiliki total aset tinggi biasanya juga memiliki kegiatan atau operasional yang lebih banyak. Sehingga operasional tersebut akan menimbulkan rumitnya transaksi yang kemudian dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Karena itu, diperkirakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan melakukan *tax avoidance*. Pernyataan itu sejalan dengan penelitian Sari (2023) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) (diproksikan dengan komite audit dan komisaris independen) dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Berikut adalah gambar yang menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis penelitian:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan teori yang relevan dan belum didasarkan terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui penngumpulan data. Berdasarkan teori yang mendasari, hipotesis penelitian ini adalah :

H₁ : Komite Audit, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2022

- H₂ : Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2022
- H₃ : Komisaris Independen secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2022
- H₄ : Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2022

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif akan menguji suatu teori dengan cara merinci suatu hipotesis-hipotesis yang spesifik, lalu mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis tersebut. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kuantitatif berdasarkan informasi statistika. Pendekatan penelitian yang dalam menjawab permasalahan penelitian memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel dari objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat digeneralisasikan terlepas dari konteks waktu, tempat dan situasi.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih dengan meneliti dan menjelaskan keterkaitan

antara variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel dengan melakukan pengujian hipotesis variabel yang diteliti.

3.1.3 Horizon waktu

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *cross sectional*. Sekaran & Bougie, (2017:77) studi *cross sectional (one-shot)* merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dengan satu fokus. Studi *cross sectional* dilakukan dengan data hanya sekali dikumpulkan selama periode tahunan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.1.4 Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individu digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisis adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Peneliti perlu memutuskan unit analisis, bahkan saat merumuskan pertanyaan penelitian karena metode pengumpulan data, ukuran sampel dan bahkan variabel yang termaksud dalam kerangk, ditentukan oleh tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisis. Berdasarkan unit observasi yang dijadikan unit analisis dari penelitian ini adalah individu.

3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan subyek penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:117). Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili karakteristik populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki populasi. Sampel digunakan jika populasi tersebut besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi (sugiyono, 2017:218).

Berdasarkan yang memenuhi kriteria tersebut, maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 79 perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara ringkass dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Kriteria Populasi Penelitian

No	Uraian	2021	2022	Jumlah
1	Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> yang terdaftar di BEI	80	85	165
2	Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> yang tidak menyajikan laporan keuangan di BEI tahun 2021-2022	(9)	(9)	(18)
3	Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> yang tidak memperoleh laba	(34)	(34)	(68)
Jumlah Sampel		37	42	79

Sumber : IDX Statistic Yearly 2021-2022, di olah tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.1 terlihat jumlah populasi penelitian pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2022 yaitu 79 perusahaan. Selanjutnya 79 perusahaan ini akan diolah datanya untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah memasukkan semua populasi menjadi sampel, sehingga disebut teknik pengambilan sampel jenuh (sensus). Nama-nama perusahaan yang menjadi pengamatan dapat dilihat pada lampiran 1.

3.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada dan tidak memerlukan data responden. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam

penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah tersedia pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2021-2022. Data tersebut diperoleh dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia <http://www.idx.co.id/>.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Operasional variabel adalah sebagai konsep yang menghubungkan antara teori atau variabel yang masih abstrak ke dalam realitas (Afrian *et al*, 2017). Dalam penelitian ini, digunakan dua variabel penelitian sebagai berikut :

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, berikut adalah variabel operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini.

a. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti,. Menyatakan bahwa variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

b. Variabel Independen

Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen.

Pada tabel 3.2 dapat dilihat sebagai ringkasan definisi operasional variabel yang digunakan oleh peneliti tersebut :

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran
Dependen				
1.	<i>Tax Avoidance</i>	Penghindaran pajak merupakan efisiensi yang dilakukan perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan CETR (<i>Cash Effective Tax Rates</i>) (Dyrenge, dkk, 2010)	$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{pre tax income}}$	Rasio
Independen				
2.	Komite Audit	Komite audit pada suatu perusahaan setidaknya terdiri dari tiga orang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik dan diketahui oleh komisaris independen (Susanti, 2008)	Komite audit = Jumlah anggota komite audit	Nominal
3	Komisaris Independen	Dewan komisaris independen dinyatakan dengan perbandingan jumlah anggota dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris (Yudha, dkk 2014).	$\text{KomInd} = \frac{\text{Jumlah KomInd}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$	Rasio

No	Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran
4	Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Kurniasih dkk, 2013).	Size = Ln Total asset	Nominal

Sumber : Data di olah (2023)

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Gujarati, Damodar (2003), analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel. Adapun persamaan regresi berganda pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 . X_1 + \beta_2 . X_2 + \beta_3 . X_3 \varepsilon$$

Keterangan :

Y : *Tax Avoidance*
 α : Konstanta
X1 : Komite Audit
X2 : Komisaris Independen
X3 : Ukuran Perusahaan
 $\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefesien
 ε : Error

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab ketiga rumusan masalah dalam penelitian. Rancangan tersebut dinyatakan dalam, yaitu:

1. Hipotesis Pertama

H_{01} : Komite Audit, Komisaris Independen dan ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022

H_{a1} : Komite Audit, Komisaris Independen dan ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022

2. Hipotesis Kedua

H_{02} : Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.

H_{a2} : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.

3. Hipotesis Ketiga

H_{03} : Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.

Ha₃ : Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan

Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.

4 Hipotesis Keempat

H0₄ : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.

Ha₄ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.

Untuk menerima dan menolak ketiga hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat hasil output SPSS. Kemudian *output* tersebut dimasukan ke kriteria menerima dan menolak hipotesis. Kriteria ini berpedoman pada Gani (2017:9) dan Supranto (2016:190). Paparan kriteria terdukung atau tidak terdukung hipotesis akan diuraikan berikut ini:

1) Kriteria menerima atau ditolak hipotesis pertama:

- Jika semua koefisien regresi sama dengan nol (β_1, β_2 dan $\beta_3, = 0$) maka H0₁ diterima dan Ha₁ ditolak. Artinya Komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Property & Real Estate*
- Jika salah satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (β_1, β_2 dan $\beta_3, \neq 0$), maka H0₂ ditolak dan Ha₂ diterima. Artinya Komite audit, komisaris independen dan ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Property & Real Estate*

2) Kriteria menerima atau ditolak hipotesis kedua:

- Jika koefisien regresi variabel X_1 sama dengan nol ($\beta_1 = 0$), maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Artinya Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Property & Real Estate*
- Jika koefisien regresi X_1 tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$), maka H_{0a2} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Property & Real Estate*.

3) Kriteria menerima atau menolak hipotesis ketiga:

- Jika koefisien regresi variabel X_2 sama dengan nol ($\beta_2 = 0$), maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Artinya Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Jika koefisien regresi X_2 tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$), maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4) Kriteria menerima atau menolak hipotesis keempat:

- Jika koefisien regresi variabel X_3 sama dengan nol ($\beta_3 = 0$), maka H_{04} diterima dan H_{a4} ditolak. Artinya Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Jika koefisien regresi X_3 tidak sama dengan nol ($\beta_3 \neq 0$), maka H_{04} tidak terdukung dan H_{a4} terdukung. Artinya Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis. Semua paparan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pertama, kedua, ketiga dan keempat.

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk melihat distribusi data variabel. Analisis ini memberikan gambaran umum nilai statistik berupa rata-rata, minimum, dan maximum. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Rata-rata	Minimum	Maksimum
<i>TAX AVOIDANCE</i>	79	0,4261	0,0001	4,7768
KOMITE AUDIT	79	2,95	2	3
KOMISARIS	79	0,4171	0,33	0,67
INDEPENDEN	79	25,6575	13,53	31,81
UKURAN PERUSAHAAN	79	-	-	-
Valid N (listwise)	79	-	-	-

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.1, nilai rata-rata *tax avoidance* yaitu sebesar 0,4261. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2021-2022 perusahaan *property & Real Estate* memiliki *tax avoidance* rata-rata 0,4261 kali atau sebesar 42,61% dari CETR.

Nilai minimum *tax avoidance* yaitu sebesar 0,0001. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2021-2022 perusahaan *Property & Real Estate* melakukan penghindaran pajak paling rendah sebesar 0,0001 kali atau sebesar 0,01%. Selain rata-rata dan nilai minimum, ada juga nilai maksimum yaitu sebesar 4,7768. Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021-2022 perusahaan *property & real estate* pernah melakukan *tax avoidance* yaitu sebesar 4,7768 kali atau 477,68%.

Berdasarkan Tabel 4.1, nilai rata-rata komite audit yaitu sebesar 2,95. Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021-2022 perusahaan *property & real estate* memiliki komite audit rata-rata 2,95 kali atau sebesar 295% dari jumlah komite audit. Nilai minimum komite audit yaitu sebesar 2 . nilai tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021-2022, perusahaan *Property & Real Estate* pernah memiliki jumlah komite audit sebanyak 2 orang. Selain rata-rata dan nilai minimum ada terdapat nilai maximum yaitu sebesar 3. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2021-2022 perusahaan *property & Real Estate* pernah memiliki jumlah komite audit paling banyak 3 orang.

Berdasarkan Tabel 4.1, nilai rata rata komisaris independen yaitu sebesar 0,4171. Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021-2022 perusahaan *Property & Real Estate* memiliki komisaris independen rata-rata 0,4171 kali atau sebesar 41,71% dari jumlah komisaris. Nilai minimum komisaris independen yaitu 0,33. Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021-2022, perusahaan *Property & Real Estate* pernah memiliki komisaris independen yang paling rendah

0,33 kali atau 33% dari total komisaris. Selain nilai rata-rata dan minimum ada juga nilai maximum yaitu sebesar 0,67. Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021-2022, perusahaan *Property & Real Estate* pernah memiliki perusahaan yang paling tinggi 0,67 kali atau sebesar 67% dari jumlah komisaris.

Berdasarkan Tabel 4.1, nilai rata-rata ukuran perusahaan yaitu sebesar 25,6575. Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021-2022 perusahaan *Property & Real Estate* melakukan transaksi ukuran perusahaan rata-rata 25,6575 kali atau sebesar 25,65% dari jumlah komisariis. Nilai minimum ukuran perusahaan yaitu sebesar 13,53. Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama 2021-2022 perusahaan *Property & Real Estate* pernah memiliki ukuran perusahaan paling rendaaah sebesar 13,53 kali atau 13,53% dari total komisaris. Selain nilai rata-rata dan minimum, ada juga nilai maksimum yaitu sebesar 31,81. Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama 2021-2022, perusahaan *Property & Real Estate* pernah memiliki ukuran perusahaan yang paling tinggi 31,81 kali atau sebesar 31,81% dari jumlah komisaris.

4.1.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masaalaah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut terdiri rumusan masalah pertama, kedua, ketiga dan keempat. Keempat hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini secara berurutan akan dipaparkan pada bagian ini. Hasil pengujian hipotesis secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.2. Sedangkan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Pengolahan Data.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Hipotesis

Persamaan Y = 0,473 - 0,188 -0,731 + 0,032 + ϵ				
t-value	0,356	-0,463	-0,810	1,699
Sig. Value	0,723	0,645	0,420	0,093
F-Value/ Sig.	1,448 / 0,236			
R / R ² / Adj.R ²	0,234 / 0,055 / 0,017			

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2024

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat hasil pengujian hipotesis yang merupakan jawaban untuk rumusan masalah dalam penelitian ini. Secara berurutan jawaban rumusan masalah tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

4.1.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian hipotesis pertama merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang pertama. Hasil pengujian pertama dalam penelitian ini akan menjawab apakah komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai beta (β) komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan secara berurutan sebesar -0,188, -0,731 dan 0,032. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $-0,188 \neq 0$, $-0,731 \neq 0$ dan $0,032 \neq 0$. Hal ini berarti semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β_1 , β_2 , dan $\beta_3 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan kedalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka Hal diterima artinya komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.1.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian hipotesis kedua merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang kedua. Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini akan menjawab apakah komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien beta (β) komite audit sebesar -0,188. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $-0,188 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta komite audit tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. H_{a2} diterima, artinya komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4.1.2.3 Hasil pengujian Hipotesis ketiga

Hasil pengujian hipotesis ketiga merupakan jawaban untuk merumuskan masalah yang ketiga. Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini akan menjawab apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien beta (β) komisaris independen sebesar, -0,731. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $-0,731 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta profitabilitas tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a3} diterima, artinya komisaris independent berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4.1.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Hasil pengujian hipotesis ketiga merupakan jawaban untuk merumuskan masalah yang ketiga. Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini akan menjawab apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien beta (β) ukuran perusahaan sebesar 0,032. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,032 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta ukuran perusahaan tidak sama dengan nol ($\beta_3 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. H_{a4} diterima, artinya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4.1.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat kontribusi komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan. Berdasarkan Tabel 4.2, nilai R Square sebesar 0,055. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yaitu sebesar 5,5% ($0,055 \times 100\%$). Sedangkan sisanya yaitu 94,5% ($100\% - 5,5\%$) dipengaruhi oleh variabel bebas lain diluar penelitian ini. Dengan demikian, fluktuasi *tax avoidance*, baik itu kenaikan maupun penurunan sangat kecil dipengaruhi oleh komite audit dan komisaris independen.

4.2 Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis telah diperoleh melalui uji regresi linear berganda pada bagian sebelumnya. Selanjutnya pembahasan untuk hasil tersebut yaitu pengaruh komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* secara simultan maupun parsial akan dibahas sebagai berikut.

4.2.1 Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β_1 , β_2 dan $\beta_3 \neq 0$). Artinya hipotesis pertama (H_{a1}) diterima. Komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh ketiga variabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa selama tahun 2021-2022 telah membawa dampak perubahan terhadap *tax avoidance*. Dampak perubahan yang terjadi pada *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* dipengaruhi oleh 3 indikator tersebut. Komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan berperan atas peningkatan maupun penurunan *tax avoidance* yang dialami oleh perusahaan *property & real estate*.

Peranan ketiga faktor tersebut terlihat dari *tax avoidance*. Perubahan terjadi baik itu kenaikan maupun penurunan *tax avoidance* tersebut merupakan cerminan dari turunnya komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan. Sehingga dapat

dikatakan bahwa ketiga variabel bebas ini secara simultan mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate*.

Adanya pengaruh komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* juga pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Mereka adalah Syafruddin dkk (2020), dan Kurnia dkk (2022). Mereka menyatakan bahwa komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hal ini memiliki arti bahwa *tax avoidance* tidak dapat dipisahkan dari komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan. Begitu juga dengan hasil penelitian ini yang juga sejalan dengan penelitian sebelumnya. Fluktuasi baik itu peningkatan ataupun penurunan *tax avoidance* ikut mempengaruhi komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan.

Semua variabel bebas dalam penelitian ini hanya mampu memprediksi variabel terikat 5,5%. Dengan istilah lain dampak komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan pada *tax avoidance* 5,5%, sedangkan sebesar 94,5% berdampak pada variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.2.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien beta (β_1) komite audit sebesar -0,463.

Nilai ini tidak sama dengan nol ($-0,463 \neq 0$). Dengan demikian maka H_2 diterima. Artinya bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penurunan *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* tidak dapat dipisahkan dari komite audit. Komite audit yang merupakan cerminan atas jumlah komite audit selama 2021-2022 berperan menurunkan *tax avoidance*. Dengan kata lain saat jumlah komite audit mengalami peningkatan, maka akan berdampak pada penurunan *tax avoidance*.

Kondisi ini juga dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* akan meningkat jika banyaknya jumlah komite audit. Dengan demikian berarti meningkatnya *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* telah disebabkan oleh kondisi peningkatan komite audit.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Dea, dkk, (2018) yang menunjukkan bahwa komite audit dapat mengurangi potensi terjadinya tindakan meminimalisir beban pajak perusahaan atau yang disebut dengan tindakan *tax avoidance*. Jadi semakin banyaknya jumlah komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan kegiatan operasional terutama dalam mengolah dan menyusun laporan keuangan terkait dengan beban pajak yang dimiliki akan semakin terawasi, sehingga perusahaan tidak akan memiliki kesempatan untuk meminimalisir besarnya beban pajak dan cenderung patuh untuk membayarkan beban pajak tersebut sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan.

4.2.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien pada beta (β_2) komisaris independen sebesar -0,810. Nilai ini tidak sama dengan nol ($-0,810 \neq 0$). Demikian maka H_{a3} diterima. Artinya bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penurunan *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* tidak dapat dipisahkan dari komisaris independen. Komisaris independen yang merupakan cerminan atas jumlah komisaris selama 2021-2022 berperan menurunkan *tax avoidance*. Dengan kata lain saat jumlah komisaris independen mengalami peningkatan, maka akan berdampak pada penurunan *tax avoidance*.

Kondisi ini juga dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* akan meningkat jika banyaknya jumlah komisaris independen. Dengan demikian berarti meningkatnya *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* telah disebabkan oleh kondisi peningkatan komisaris independen.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Dea dkk, (2020). Mereka menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen mampu mengurangi potensi terjadinya tindakan *tax avoidance*, yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir besarnya pembayaran atas beban pajak yang dimiliki. Semakin banyak jumlah komisaris independen dalam

perusahaan maka pengawasan atas kegiatan operasional perusahaan akan semakin baik dan ketat, sehingga perusahaan tidak dapat memiliki peluang atau celah-celah untuk meminimalisir besarnya pajak yang akan dibayarkan dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

4.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Hasil menunjukkan statistik bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien nilai beta (β_3) ukuran perusahaan sebesar 1,699. Nilai ini tidak sama dengan nol ($1,699 \neq 0$). Dengan demikian maka H_{a3} diterima. Artinya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Nilai tersebut berperan menaikkan praktik *tax avoidance*. Dengan kata lain, saat ukuran perusahaan meningkat akan berdampak juga pada *tax avoidance*. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* akan naik jika perbandingan ukuran perusahaan atas total asset meningkat. Dengan demikian berarti meningkatnya *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* telah disebabkan oleh adanya peningkatan ukuran perusahaan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Sari (2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Peningkatan *tax avoidance* akan terjadi jika ukuran perusahaan meningkat, maka akan selalu akan diikuti oleh meningkatnya *tax avoidance* pada perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan dengan komite audit dan komisaris independen, serta ukuran perusahaan terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022 sebagai tahun observasi. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, maka penelitian ini menjelaskan bahwa:

- 1) Komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.
- 2) Komite audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.
- 3) Komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.

- 4) Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang telah disampaikan, ada beberapa saran yang penulis sampaikan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengganti maupun menambahkan proksi dari *Good Corporate Governance* (GCG) diluar variabel dalam penelitian ini agar lebih menggambarkan peran masing-masing struktur ataupun mekanisme GCG khususnya terhadap tindakan *tax avoidance*.
- 2) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi lain dari *tax avoidance*. Apabila data pajak penghasilan perusahaan memungkinkan untuk diperoleh, maka data tersebut dapat dijadikan proksi alternatif yang mungkin lebih menggambarkan tindakan *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N., Santoso, E. B., & Isnani, I. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2011–2015). *Journal of Accounting*, 3(3).
- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018, August). *The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance*. In *PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences)*.
- Amelia, R., Muslih, M., & Kurnia, K. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. *eProceedings of Management*, 9(5).
- Amelia, W., & Hernawati, E. (2016). Pengaruh Komisaris independen, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap manajemen laba. *Neo-Bis*, 10(1), 62-77.
- Barli, H. (2018). Pengaruh *Leverage* Dan *Firm Size* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan sektor *Property, Real Estate* dan *Building Construction* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–238.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (*Size*), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Danny, A. S. (2021). Pengaruh Komite Audit, Kompensasi Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. 1-22
- Dyrenge, S. D., M. Hanlon, dan E. L. Maydew. 2010. *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*. *The Accounting Review* 85(4): 1163-1189.
- Dea, H. S., & Fadrijah, A. N. (2018). Pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(1).

- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan *Property* dan *Real Estate*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372.
- Hery. 2017. “Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini Dalam Bidang Akuntansi Dan Keuangan”. Jakarta, PT Grasindo. Hal 3
- Isnania, S. A., Sukarmanto, E., & Maemunah, M. (2018). Pengaruh komite audit, dewan komisaris independen dan reputasi kap terhadap audit *report lag*. *Prosiding Akuntansi*, 40-45.
- Karinda, W. D. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba. 6–7.
- Kurniasih, Tommy., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh *Return on Assets* , *Leverage* , *Corporate Governance* , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66
- Lana, M. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas *Voluntary Disclosure* Laporan Keuangan Tahunan. *Iee Proceedings F: Communications Radar and Signal Processing*, 132(2), 107–110.
- Mangoting, Y. (2020). *Tax Planning*: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. 43–53
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39-47.
- Mulyani, S., Susana Theorupun, M., & Niqrisah Dwi Pratiwi, Y. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Size, *Leverage* Dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2), 2021.
- Oktofian, M. (2015). Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*: studi empiris pada sektor perbankan yang terdaftar di bei periode tahun 2009-2013.
- Putra, Brayen Prastika Dwi. "Pengaruh dewan komisaris, proporsi komisaris independen, terhadap kinerja perusahaan." *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 8.2 (2015): 70-85.
- Putri, D. P. A., & Trisnaningsih, S. (2023). Pentingnya Perusahaan Dalam Menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance*. *Sibatik Journal: Jurnal*

- Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(11), 3453-3458.
- Pratiwi, L. (2014). Analisis Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan. Skripsi: Universitas Diponegoro
- Rusydy, Khoiru dan Martani, Dwi. (2013). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap *aggressive tax avoidance*. SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram.
- Sari, N. (2023). *Pengaruh ukuran perusahaan, komite audit dan komisaris independen terhadap tax avoidance pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Putra Bangsa).
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, 2017, *Metode Penelitian untuk bisnis : Pendekatan pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta Selatan
- Siregar, A. A., & Syafruddin, M. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, S. I. A. (2008). Pengaruh Kualitas *Corporate Governance*, Kualitas Audit, dan *Earnings Management* Terhadap Kinerja Perusahaan (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Ta'dir, P. E., Parengkuan, T., & Ivone, S. S. (2014). Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Risiko Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal EMBA*, 2(2).
- Tanaka, C., Yanty, Y., Rani, D. D., & Rahmi, N. U. (2021). Pengaruh Komite Audit, Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, *Good Corporate Governance* Dan Beban Pajak Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Property, Real Estate And Building Construction* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016-2019. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(2), 778-790.

- Widayanti, E., Purba, J., Ritonga, D., & Andriyani, M. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019. 7(1), 75–95
- Yudha, Latifah dan Adi Prasetyo. (2014).“ Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Go Public di BEI”. Jurnal Ekonomi Universitas Muhamadiyah Malang
- Zeng, T. (2019). *Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence*. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Nama-nama perusahaan *Property & Real Estate* yang menjadi pengamatan penelitian

No	Tahun	Kode	Nama Perusahaan
1	2021	AMAN	Makmur Berkah Amanada Tbk [S]
2		ASRI	Alam Sutera Reality Tbk [S]
3		ATAP	Trimitra Prawara Goldland Tbk [S]
4		BCIP	Bumi Citra Permai Tbk [S]
5		BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk [S]
6		CSIS	Cahayasakti Investindo Sukses Tbk [S]
7		CTRA	Ciputra Development Tbk [S]
8		DADA	Diamond Citra Propertindo Tbk [S]
9		DILD	Intiland Development Tbk [S]
10		DMAS	Puradelta Lestari Tbk [S]
11		DUTI	Duta Pertiwi Tbk [S]
12		FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk [S]
13		GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk [S]
14		GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk [S]
15		HOMI	Grand House Mulia Tbk [S]
16		INDO	Royalindo Investa Wijaya Tbk
17		IPAC	Era Graharealty Tbk
18		JRPT	Jaya Real Property Tbk [S]
19		KBAG	Karya Bangsa Anugrah Tbk [S]
20		KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk [S]
21		LPCK	Lippo Cikarang Tbk [S]
22		LPLI	Star Pacifik Tbk
23		MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk [S]
24		MMLP	Mega Menunggal property Tbk [S]
25		MTLA	Metropolitan Land Tbk [S]
26		NZIA	Nusantara Almazia Tbk [S]
27		PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk [S]
28		POLI	Pollux Hotels Group Tbk
29		PPRO	PP Property Tbk
30		PURI	Puri Global Sukses Tbk [S]
31		PWON	Pakuwon Jti Tbk [S]
32		RDTX	Roda Vivatex Tbk [S]
33		REAL	Repower Asia Indonesia Tbk [S]
34		ROCK	Rockfields Property Indonesia Tbk [S]
35		SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
36		SMRA	Summarecon Agung Tbk [S]
37		URBN	Urban Jakarta Propertindo Tbk [S]

No	Tahun	Kode	Nama Perusahaan
1	2022	ADCP	Adhi commuter Property Tbk
2		AMAN	Makmur Berkah Amanada Tbk
3		ASRI	Alam Sutera Reality Tbk
4		ATAP	Trimitra Prawara Goldland Tbk
5		BCIP	Bumi Citra Permai Tbk
6		BSBK	Wulandari Bangun Laksana Tbk
7		BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
8		CSIS	Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
9		CTRA	Ciputra Development Tbk
10		DADA	Diamond Citra Propertindo Tbk
11		DILD	Intiland Development Tbk
12		DMAS	Puradelta Lestari Tbk
13		DUTI	Duta Pertiwi Tbk
14		FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk
15		GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk
16		GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk
17		HOMI	Grand House Mulia Tbk
18		INDO	Royalindo Investa Wijaya Tbk
19		IPAC	Era Graharealty Tbk
20		JRPT	Jaya Real Property Tbk
21		KBAG	Karya Bangsa Anugrah Tbk
22		KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk
23		LPCK	Lippo Cikarang Tbk
24		LPLI	Star Pacifik Tbk
25		MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk
26		MMLP	Mega Menunggal property Tbk
27		MTLA	Metropolitan Land Tbk
28		NZIA	Nusantara Almazia Tbk
29		PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk
30		POLI	Pollux Hotels Group Tbk
31		PPRO	PP Property Tbk
32		PURI	Puri Global Sukses Tbk
33		PWON	Pakuwon Jti Tbk
34		RDTX	Roda Vivatex Tbk
35		REAL	Repower Asia Indonesia Tbk
36		RISE	Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk
37		ROCK	Rockfields Property Indonesia Tbk
38		SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk
39		SMRA	Summarecon Agung Tbk
40		SWID	Saraswanti Indoland Development Tbk
41		URBN	Urban Jakarta Propertindo Tbk
42		WINR	Winner Nusantara Jaya Tbk

Lampiran 2 Operasional Variabel *Tax Avoidance*

Rasio <i>Tax Avoidance</i> 2021				
No	Kode	pembayaran pajak	laba sebelum pajak	rasio
1	AMAN	3,459,634	28,936,609	0.11955907
2	ASRI	147,554,907	158,479,487	0.93106628
3	ATAP	2,411,749,987	7,765,353,094	0.31057828
4	BCIP	3,356,933,551	3,533,027,936	0.95015766
5	BSDE	6,913,553,386	1,547,006,489,870	0.00446899
6	CSIS	373,604,740	21,672,254,143	0.01723885
7	CTRA	301,309	2,396,714	0.12571754
8	DADA	1,916,793,459	7,004,158,489	0.27366506
9	DILD	91,719,217,645	52,812,173,054	1.736706
10	DMAS	36,762,789,913	730,898,148,439	0.0502981
11	DUTI	86,098,289,180	731,322,766,012	0.11772954
12	FMII	1,359,419,402	9,921,736,515	0.13701426
13	GPRA	5,431,471,359	51,128,043,950	0.10623272
14	GWSA	167,164,333	19,903,021,826	0.00839894
15	HOMI	552,743,209	6,936,172,128	0.07968995
16	INDO	512,609,008	8,943,932,859	0.0573136
17	IPAC	76,962,461	5,014,206,111	0.01534888
18	JRPT	177,629,728	797,817,044	0.22264469
19	KBAG	1,078,511,830	1,781,165,720	0.60550898
20	KIJA	33,154,889,120	100,330,430,110	0.33045696
21	LPCK	60,724	215,527	0.2817466
22	LPLI	4,169	250,699	0.0166295
23	MKPI	122,412,684,245	412,578,500,051	0.29670156
24	MMLP	29,200,839	362,170,803	0.08062726
25	MTLA	129	430,589	0.00029959
26	NZIA	1,503,455,139	4,421,506,549	0.34003232
27	PLIN	52,613,004	503,634,642	0.10446661
28	POLI	7,874,933	32,640,595,727	0.00024126
29	PPRO	30,609,348,276	44,747,398,808	0.68404754
30	PURI	2,134,544,752	9,072,601,203	0.23527373
31	PWON	17,166,740	1,564,246,044	0.01097445
32	RDTX	83.181.000	196,384,936,622	0.00042356
33	REAL	714,903,694	1,865,261,871	0.38327256
34	ROCK	7,953,227,407	2,637,158,423	3.01583224
35	SMDM	13,228,859,105	119,289,897,200	0.11089673
36	SMRA	241,614,171	755,916,681	0.31963069
37	URBN	14,799,673,924	93,143,841,910	0.15889052

Rasio Tax Avoidance 2022				
No	Kode	pembayaran pajak	laba sebelum pajak	Rasio
1	ADCP	23,529,177,029	105,019,861,668	0.22404502
2	AMAN	6,877,407	38,962,387	0.176514006
3	ASRI	151,553,218	1,106,143,111	0.137010498
4	ATAP	1,084,868,503	3,655,044,279	0.296814052
5	BCIP	6,482,471,754	21,202,560,879	0.305740037
6	BSBK	20,177,877,796	4,224,181,012	4.776755006
7	BSDE	9,114,370,155	2,661,691,654,486	0.003424277
8	CSIS	223,033,360	26,692,517,807	0.008355651
9	CTRA	301,309	2,309,573	0.130460912
10	DADA	750,179,255	1,640,384,221	0.457319234
11	DILD	96,330,788,242	259,162,210,388	0.371700751
12	DMAS	81,057,279,478	1,238,832,140,678	0.065430398
13	DUTI	106,944,042,628	848,355,149,032	0.126060463
14	FMII	1,327,680,636	18,621,524,594	0.071298171
15	GPRA	9,284,780,401	77,391,754,171	0.119971184
16	GWSA	18,667,039,423	30,555,538,591	0.610921629
17	HOMI	885,311,647	8,880,293,297	0.099693965
18	INDO	345,000,000	32,735,679,996	0.010538959
19	IPAC	359,967,406	6,127,828,353	0.058743063
20	JRPT	99,073,785	892,861,723	0.11096207
21	KBAG	1,061,635,575	9,376,834,470	0.113218974
22	KIJA	60,534,003,588	48,892,233,242	1.238110832
23	LPCK	105,619	363,333	0.290694762
24	LPLI	6,016	43,685	0.137713174
25	MKPI	169,619,592,837	854,922,482,020	0.198403477
26	MMLP	29,677,808	194,459,968	0.152616543
27	MTLA	429	476,631	0.000900067
28	NZIA	2,610,644,626	1,070,822,942	2.437979729
29	PLIN	86,580,767	579,356,012	0.149443115
30	POLI	9,902,285	163,884,393,272	6.04224E-05
31	PPRO	54,295,168,881	66,631,470,557	0.814857731
32	PURI	1,908,856,051	721,876,100	2.644298725
33	PWON	864,586	1,840,056,301	0.000469869
34	RDTX	37,735,652	272,103,914,200	0.000138681
35	REAL	221,854,548	392,936,204	0.564607042
36	RISE	11,941,509,988	44,755,418,474	0.266817078
37	ROCK	9,612,136,914	15,346,295,086	0.626349022
38	SMDM	17,271,147,087	181,421,560,158	0.095198978
39	SMRA	326,079,600	1,017,856,287	0.320359175
40	SWID	1,343,175,044	23,642,597,872	0.056811652
41	URBN	20,152,121,624	26,055,850,704	0.773420214
42	WINR	808,483,256	5,772,244,915	0.140063921

Lampiran 3 Operasioanl Variabel Komite Audit

No		Kode	Jumlah Komite Audit
1	2021	AMAN	3
2		ASRI	3
3		ATAP	3
4		BCIP	3
5		BSDE	3
6		CSIS	3
7		CTRA	3
8		DADA	2
9		DILD	3
10		DMAS	3
11		DUTI	3
12		FMII	3
13		GPRA	3
14		GWSA	3
15		HOMI	3
16		INDO	3
17		IPAC	3
18		JRPT	3
19		KBAG	3
20		KIJA	3
21		LPCK	3
22		LPLI	3
23		MKPI	3
24		MMLP	3
25		MTLA	3
26		NZIA	3
27		PLIN	3
28		POLI	3
29		PPRO	3
30		PURI	3
31		PWON	3
32		RDTX	2
33		REAL	3
34		ROCK	3
35		SMDM	3
36		SMRA	3
37		URBN	3

No	Tahun	Kode	jumlah komite audit
1	2022	ADCP	3
2		AMAN	3
3		ASRI	3
4		ATAP	3
5		BCIP	3
6		BSBK	3
7		BSDE	3
8		CSIS	3
9		CTRA	3
10		DADA	2
11		DILD	3
12		DMAS	3
13		DUTI	3
14		FMII	3
15		GPRA	3
16		GWSA	3
17		HOMI	3
18		INDO	3
19		IPAC	3
20		JRPT	3
21		KBAG	3
22		KIJA	3
23		LPCK	3
24		LPLI	3
25		MKPI	3
26		MMLP	3
27		MTLA	3
28		NZIA	3
29		PLIN	3
30		POLI	3
31		PPRO	3
32		PURI	3
33		PWON	3
34		RDTX	2
35		REAL	3
36		RISE	3
37		ROCK	3
38		SMDM	3
39		SMRA	3
40		SWID	3
41		URBN	3
42		WINR	3

Lampiran 4 Operasional Variabel Komisaris Independen

No	Tahun	Kode	jumlah komisaris independen	jumlah dewan komisaris	Rasio
1	2021	AMAN	1	3	0.33
2		ASRI	2	5	0.40
3		ATAP	1	2	0.50
4		BCIP	1	3	0.33
5		BSDE	1	2	0.50
6		CSIS	1	2	0.50
7		CTRA	3	6	0.50
8		DADA	1	3	0.33
9		DILD	2	5	0.40
10		DMAS	2	6	0.33
11		DUTI	2	5	0.40
12		FMII	1	3	0.33
13		GPRA	1	3	0.33
14		GWSA	1	3	0.33
15		HOMI	1	2	0.50
16		INDO	1	2	0.50
17		IPAC	1	2	0.50
18		JRPT	1	2	0.50
19		KBAG	1	2	0.50
20		KIJA	1	3	0.33
21		LPCK	2	6	0.33
22		LPLI	2	4	0.50
23		MKPI	4	11	0.36
24		MMLP	2	3	0.67
25		MTLA	2	5	0.40
26		NZIA	1	3	0.33
27		PLIN	1	3	0.33
28		POLI	2	5	0.40
29		PPRO	2	3	0.67
30		PURI	1	3	0.33
31		PWON	1	3	0.33
32		RDTX	1	3	0.33
33		REAL	1	3	0.33
34		ROCK	1	2	0.50
35		SMDM	1	3	0.33
36		SMRA	3	5	0.60
37		URBN	1	2	0.50

No	Tahun	Kode	jumlah komisaris independen	jumlah dewan komisaris	Rasio
1	2022	ADCP	2	5	0.40
2		AMAN	1	3	0.33
3		ASRI	2	5	0.40
4		ATAP	1	2	0.50
5		BCIP	1	3	0.33
6		BSBK	1	3	0.33
7		BSDE	2	5	0.40
8		CSIS	1	2	0.50
9		CTRA	3	6	0.50
10		DADA	1	3	0.33
11		DILD	2	5	0.40
12		DMAS	2	6	0.33
13		DUTI	2	5	0.40
14		FMII	1	3	0.33
15		GPRA	1	3	0.33
16		GWSA	1	3	0.33
17		HOMI	1	2	0.50
18		INDO	1	2	0.50
19		IPAC	1	2	0.50
20		JRPT	1	2	0.50
21		KBAG	1	2	0.50
22		KIJA	1	3	0.33
23		LPCK	1	3	0.33
24		LPLI	2	4	0.50
25		MKPI	4	11	0.36
26		MMLP	2	3	0.67
27		MTLA	2	5	0.40
28		NZIA	1	3	0.33
29		PLIN	1	3	0.33
30		POLI	2	5	0.40
31		PPRO	2	3	0.67
32		PURI	1	3	0.33
33		PWON	1	3	0.33
34		RDTX	1	3	0.33
35		REAL	1	3	0.33
36		RISE	1	3	0.33
37		ROCK	1	2	0.50
38		SMDM	1	3	0.33
39		SMRA	3	5	0.60
40		SWID	1	3	0.33
41		URBN	1	2	0.50
42		WINR	1	2	0.50

Lampiran 5 Operasional Variabel Ukuran Perusahaan

No	Tahun	Kode	total asset	Ukuran perusahaan
1	2021	AMAN	861,888,870	20.5746369
2		ASRI	21,933,974,714	23.81130263
3		ATAP	92,377,902,100	25.24915363
4		BCIP	887,073,065,396	27.51119319
5		BSDE	61,469,712,165,656	31.74956568
6		CSIS	526,136,140,616	26.98882584
7		CTRA	21,916,840	16.90276585
8		DADA	631,233,385,628	27.1709415
9		DILD	16,460,004,827,627	30.4319546
10		DMAS	6,113,941,603,354	29.44159279
11		DUTI	15,308,923,447,779	30.35945701
12		FMII	869,030	13.67513293
13		GPRA	1,760,551,462,449	28.19664821
14		GWSA	7,558,387,262,329	29.65367896
15		HOMI	265,809,234,206	26.30604472
16		INDO	980,668,268,510	27.61150008
17		IPAC	32,957,177,249	24.2184749
18		JRPT	11,748,147,834	23.18696143
19		KBAG	458,744,601,288	26.85175947
20		KIJA	12,292,090,330,026	30.13997711
21		LPCK	9,134,537	16.02757306
22		LPLI	974,069	13.78923742
23		MKPI	7,994,282,432,092	29.70974771
24		MMLP	7,107,303,861	22.68438881
25		MTLA	6,409,548	15.67329931
26		NZIA	633,543,391,000	27.17459433
27		PLIN	11,971,692,555	23.20581075
28		POLI	2,440,573,927,925	28.52325434
29		PPRO	21,086,427,083,575	30.67965068
30		PURI	224,744,062,680	26.13822809
31		PWON	28,866,081,129	24.08593308
32		RDTX	3,161,105,356,526	28.78194288
33		REAL	353,731,723,320	26.59180462
34		ROCK	1,046,987,621,332	27.67693822
35		SMDM	3,303,511,723,151	28.82600718
36		SMRA	26,049,716,678	23.98327273
37		URBN	4,053,223,772,464	29.03053367

No	Tahun	Kode	total asset	Ukuran perusahaan
1	2022	ADCP	6,321,024,480,878	29.47490241
2		AMAN	966,109,133	20.68878736
3		ASRI	22,298,925,271	23.82780432
4		ATAP	115,428,413,973	25.47191638
5		BCIP	884,034,513,121	27.50776194
6		BSBK	2,521,415,902,502	28.55584173
7		BSDE	64,999,403,480,787	31.80539921
8		CSIS	546,666,448,170	27.02710467
9		CTRA	23,571,974	16.97556902
10		DADA	660,425,520,304	27.21615019
11		DILD	16,351,848,378,006	30.42536206
12		DMAS	6,623,414,189,145	29.52163209
13		DUTI	15,586,178,093,961	30.37740562
14		FMII	752,866	13.53164254
15		GPRA	1,781,355,644,223	28.20839579
16		GWSA	7,788,405,536,526	29.68365727
17		HOMI	265,322,673,542	26.30421256
18		INDO	980,544,177,714	27.61137354
19		IPAC	39,088,524,959	24.38909478
20		JRPT	12,251,800,500	23.22893874
21		KBAG	443,422,913,606	26.81778981
22		KIJA	13,110,459,383,600	30.20443145
23		LPCK	9,349,613	16.05084551
24		LPLI	1,125,536	13.93376992
25		MKPI	8,155,939,004,812	29.72976749
26		MMLP	7,635,870,085	22.75612273
27		MTLA	6,735,895	15.72296125
28		NZIA	605,500,645,195	27.12932147
29		PLIN	12,369,620,391	23.23850934
30		POLI	2,583,234,248,023	28.58006331
31		PPRO	21,812,999,448,669	30.71352721
32		PURI	316,737,170,421	26.48133815
33		PWON	30,602,179,916	24.14433708
34		RDTX	3,387,321,004,206	28.85106046
35		REAL	352,269,524,066	26.58766241
36		RISE	2,712,160,950,002	28.62876683
37		ROCK	1,036,286,843,364	27.6666651
38		SMDM	3,423,278,470,836	28.86161983
39		SMRA	28,433,574,878	24.0708365
40		SWID	317,486,202,102	26.4837002
41		URBN	4,269,806,195,058	29.08258955
42		WINR	419,280,591,650	26.7618062

Lampiran 6 *Output* pengolahan data

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAX AVOIDANCE	79	0,0001	4,7768	0,426122	0,7778964
KOMITE AUDIT	79	2	3	2,95	0,221
KOMISARIS INDEPENDEN	79	0,33	0,67	0,4171	0,09892
UKURAN PERUSAHAAN	79	13,53	31,81	25,6575	4,71768
Valid N (listwise)	79				

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,234 ^a	0,055	0,017	0,7712748

a. Predictors: (Constant), UKURAN PERUSAHAAN, KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,585	3	0,862	1,448	0,236 ^b
Residual	44,615	75	0,595		
Total	47,200	78			

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

b. Predictors: (Constant), UKURAN PERUSAHAAN, KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,473	1,331		0,356	0,723
KOMITE AUDIT	-0,188	0,407	-0,053	-0,463	0,645
KOMISARIS INDEPENDEN	-0,731	0,902	-0,093	-0,810	0,420
UKURAN PERUSAHAAN	0,032	0,019	0,192	1,699	0,093

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE